

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**RENCANA KERJA PERUBAHAN
PERANGKAT DAERAH
(RENJA PERUBAHAN)
SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2025**

**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025. Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administrative terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrative kepada seluruh perangkat daerah dituntut untuk dapat melakukan perubahan secara proaktif kearah perbaikan.

Dengan tersusunnya Renja Perubahan ini maka Sekretariat Daerah mempunyai acuan tentang pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana kinerja, penetapan kinerja, pelaksanaan tugas, pengendalian kegiatan di lingkungan Sekretariat Daerah, Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun, diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Painan, 2025

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001

DAFTAR ISI

Daftar Isi		I
Daftar Tabel		II
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Landasan Hukum	4
	1.3 Maksud dan Tujuan	5
	1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II	HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH TAHUN LALU	11
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu	11
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah	22
	2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	32
	2.4 Review Terhadap Ranjangan Awal RKPD	35
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
	3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	49
	3.2 Tujuan dan Sasaran	49
	3.3 Program dan Kegiatan	51
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	65
BAB V	PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	13
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	23
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	36
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Rencana Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025	50
Tabel 3.2	Rumusan Rencana Kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	55
Tabel 4.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Tahun 2025	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD), merupakan dokumen perubahan perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Rencana kerja Perubahan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok dan fungsi suatu Perangkat Daerah, disamping juga berpedoman pada Rencana Strategis, RPJMD dan RPJPD. Perubahan Rencana kerja Sekretariat Daerah Tahun 2025 disusun berpedoman pada Visi Misi Bupati Terpilih Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025-2029. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan juga didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026. Dengan adanya acuan diatas, rencana kerja perubahan yang disusun diharapkan dapat sistematis dan berkelanjutan dalam mencapai sasaran. Pada akhirnya Perubahan Renja diharapkan dapat menjadi acuan untuk menyusun anggaran kinerja yang tertuang dalam APBD Perubahan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 adalah dokumen perubahan perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari Renstra. Renstra yang telah ditetapkan ditinjau kembali sesuai dengan rasionalisasi Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 berdasarkan pohon kinerja dan cascading Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 pada awal Tahun 2023, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya dan Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah), penyesuaian untuk mengintegrasikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan pembangunan dan perubahan aturan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD Perubahan serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD lima tahunan Perangkat Daerah, kemudian diterjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja Perubahan tahunan Perangkat Daerah. Hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD.

Penyusunan APBD didasarkan pada perencanaan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, mengenai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Bila dilihat dari perspektif waktunya, perencanaan di tingkat pemerintah daerah dibagi menjadi tiga kategori yaitu: Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 20 tahun; Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan perencanaan pemerintah daerah untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan perencanaan tahunan daerah. Sedangkan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah terdiri dari: Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah merupakan rencana untuk periode 5 tahun; dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

Proses penyusunan perencanaan di tingkat Perangkat Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra-PD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- b. Penyusunan Renstra-PD dimaksud berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program PD, lintas PD, dan program kewilayahan.
- c. Pemda menyusun Rencana Kerja pemerintah daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja PD untuk jangka waktu satu tahun yang mengacu kepada Renja Pemerintah.

- d. Renja PD merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
- e. RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas, pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemma maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- f. Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud di atas adalah mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- h. Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- i. RKPD ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Dokumen Renja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 menjabarkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan meneruskan arah pembangunan di bidang administrasi pemerintahan serta penyusunan kebijakan lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Tahun 2025. Disamping itu, Renja Perubahan yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan agar lebih terarah dan terjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan. Peningkatan keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan di Pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan.

Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Renja Perubahan Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen Renstra Perangkat Daerah dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauhmana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh Perangkat Daerah serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2025 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu, meliputi: evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja dan review rancangan awal Rencana Kerja Perubahan Pemerintah Daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

- Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889Tahun 2021tentangHasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomen klatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 110 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025 disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan jangka pendek sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan daerah dan acuan resmi bagi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Penyusunan dan Penerapan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk :

1. Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pembangunan di bidang ke sekretariatan daerah;
2. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan.
5. Menyediakan satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Tujuan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 disusun untuk menentukan arah dan tujuan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, dan untuk tujuan strategisnya, sehingga setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
2. Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LAKIP);
3. Menentukan arah kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam optimalisasi pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terciptanya pertanggung jawaban kinerja Sekretariat Daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Bagian –Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
6. Adanya kontribusi Sekretariat Daerah bagi keberhasilan pencapaian visi dan misi Kabupaten Pesisir Selatan.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menjelaskan tentang latar belakang penyusunan Renja Perubahan, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang renja perubahan SKPD, proses Penyusunan Renja Perubahan, keterkaitan antara renja perubahan SKPD dengan dokumen Renstra SKPD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan Peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK. Dan kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perubahan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

TAHUN LALU

Menerangkan tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan capaian Renstra Sekretariat Daerah, Analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah, Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah dan Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2025 dan Capaian Renstra Sekretariat Daerah.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun

berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

Berisikan uraian sebagai berikut:

1. Tingkat kinerja pelayanan RKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi.
3. Peluang dan tantangan dalam peningkatan pelayanan, dan
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk menindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Reviu terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretariat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Berisikan rencana program dan kegiatan mengenai rekapitulasi program dan

kegiatan, antara lain meliputi:

- 3.1. Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- 3.2. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut Sumber pendanaannya.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
TRIWULAN I TAHUN 2025

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 senilai Rp. 32.071.058.921,- (Tiga Puluh Dua Milyar Tujuh Puluh Satu Juta Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) terdiri dari 3(Tiga) program dan 20 kegiatan dan 51 Sub Kegiatan, realisasi anggaran triwulan satu senilai Rp.7.864.567.168,- (Tujuh Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Seratus Enam Puluh Delapan Rupiah), untuk menilai kinerja capaian keuangan dan hasil kegiatan, status capaian kinerja dikelompokkan menjadi "Sangat Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 91-100%, "Tinggi" yaitu capaian berkisar antara 75-90%, "Sedang" yaitu capaian berkisar antara 65-74%, "Rendah" yaitu capaian berkisar antara 50-64%, dan "Sangat Rendah" yaitu capaian di bawah 50%.

Berdasarkan capaian kinerja keuangan pelaksanaan Renja tahun 2025 triwulan satu terdapat 20 kegiatan yang dengan status capaian "Sangat Rendah" (47%). Untuk capaian kinerja keluaran (output) kegiatan semuanya sudah tercapai sesuai perencanaan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat dari berbagai indikator pada setiap sasaran yang akan dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, berdasarkan Tabel Rekapulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKT Sekretariat Daerah dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah sampai dengan Tahun berjalan, dengan Tabel 2.1 sebagaimana berikut :

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah. Tercapai atau tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk

perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggung jawaban yang dilaksanakan secara periodik.

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

TABEL 2.1										
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2024 KABUPATEN PESIR SELATAN										
Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan										
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-2) 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (N-2) 2023			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1) 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan Tahun (n-1) 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
			K	K	K	K	K	K	K	K
	URUSAN SEKRETARIAT DAERAH									
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
4 01 01	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	80%	80%	80%	80%	80%	80%	20%	80%
4 01 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%
4 01 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen
4 01 01 2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	20%	100%

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	123 Org	124 Org	124 Org
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	12 Dokumen	-	8 Dokumen
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	20 Laporan
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	100%
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	-	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	-	4 Paket
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan
4	01	01	2,06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	5 Dokumen	55 Dokumen
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	15 Unit	-	15 Unit

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	-	5 Paket
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	-	5 Unit
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Bulan	12 Bulan
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	-	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)
4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	4 Laporan	36 Laporan
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	12 Laporan	-	1 Laporan
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	1	5 Laporan
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	85 unit	85 unit	85 unit	85 unit	85 unit	85 unit	7	85 unit
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	2 Unit Mobil	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	2 Unit Mobil	15 Unit Mobil/41 Unit Motor
4	01	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	-	4 Unit
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	79 Unit	79 Unit	79 Unit	79 Unit	79 Unit	75 Unit	8 Unit	79 Unit
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

		Dipelihara/Direhabilitasi									
4	01 01 2,11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Bulan	12 Bulan
4	01 01 2,11 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan
4	01 01 2,11 02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	-	2 Paket
4	01 01 2,11 03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang
4	01 01 2,11 04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	100 Org	±400 Org
4	01 01 2,12	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumah tangga Sekretariat Daerah	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Bulan	12 Bulan
4	01 01 2,12 01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4	01 01 2,12 02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4	01 01 2,12 03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
4	01 01 2,13	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
			Indeks Reformasi Birokrasi	56	56	56	56	56	58	-	56
			Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	68	68	68	68	68	70	-	68
			Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Publik	80	80	80	80	80	82	-	80

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	-	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	-	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)
4	01	01	2,13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen
4	01	01	2,13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	-	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	2 Bulan	12 Bulan
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan
4	01	01	2,14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persesentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	-	5 Dokumen
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	1 Dokumen	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	79 Kali	79 Kali	79 Kali	79 Kali	79 Kali	79 Kali	79 Kali	79 Kali
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	5 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	5 Dokumen	-	6 Dokumen

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	-	4 Dokumen
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25 %	100%
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	986 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	500 dokumen	40 dokumen	986 dokumen
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus		-	3 kasus
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	300 dokumen	25 dokumen	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	3 Dokumen	-	5 Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	-	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	-	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen

				Ekonomi Mikro Kecil										
4	01	03	2,02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%	
4	01		2,02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	-	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	45 Laporan	45 Laporan	20 Laporan
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	12 Laporan
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25	100%
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	16 Dokumen	100 Dokumen
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	5 Orang	-	3 Orang
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	100%
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	--	5 Dokumen

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

4	01	03	2,04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen
4	01	03	2,04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan sarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi. Perbaikan dan peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar Perangkat Daerah. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

TABEL 2.2														
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN														
NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	2	3	4	5	6	7			8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen
2	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org	124 Org
3	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen	8 Dokumen
4	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD			20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan
5	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)	4 Laporan (Persediaan, Laporan Mutasi Barang, Belanja Modal dan RKBMD)

6	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	
7	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
8	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
9	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu			3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	
10	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
11	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	55 Dokumen	
12	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	5 Paket	
13	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	
14	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	
15	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

16	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
17	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	
18	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	
19	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	
20	Jumlah Mebel yang Dipelihara			4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	
21	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			79 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	75 Unit	79 Unit	79 Unit	79 Unit	75 Unit	
22	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
23	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	
24	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	

25	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	
26	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	
27	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	±400 Org	
28	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
29	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
30	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	
31	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

32	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	
33	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	
34	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	
35	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	4 Dokumen (Lakip, Rencana Aksi, Capaian Kinerja Pemda, Perjanjian Kinera Pemda)	
36	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
37	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	

38	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
39	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
40	Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi kewilayahan			5 Dokumen	100%	100%	100%	100%	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	
41	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
42	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	
43	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	
44	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB			6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	

45	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas			4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	
46	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun			986 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	600 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	986 dokumen	600 dokumen	
47	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum			3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	4 kasus	4 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	3 kasus	
48	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi			25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	100 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	100 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	100 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	100 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	25 Berita Daerah dan 250 Lembaran Daerah	
49	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	
50	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD			2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	
51	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian			2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	
52	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

53	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah			4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	4 Dokumen (ASB, HSPK, Pedoman APBD, Sisdur Perjalanan Dinas)	
54	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan			20 Laporan	40 Laporan	45 Laporan	50 Laporan	55 Laporan	60 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	40 Laporan	
55	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	
56	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	100 Dokumen	
57	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik			41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	41 Dokumen	
58	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			3 Orang	4 Orang	5 Orang	6 Orang	7 Orang	7 Orang	3 Orang	3 Orang	3 Orang	4 Orang	
59	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	

60	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	
61	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

a. Kondisi Organisasi dan Aparatur.

Sekretariat Daerah sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendorong terlaksananya berbagai program pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan. Penguatan terhadap struktur organisasi pada Sekretariat Daerah perlu mendapatkan perhatian lebih.

Peningkatan kompetensi aparatur dan ketersediaan sarana dan Prasarana penunjang tugas merupakan salah satu prioritas dalam perencanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah. Setiap aparatur memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling menunjang dalam pelaksanaan tugas. Agar tercapainya kompetensi aparatur yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, maka perlu dilakukan peningkatan keahlian dan pengetahuan terhadap aparatur tersebut. Pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap bidang tugas menjadikan pekerjaan makin efektif dan efisien. Sejalan dengan itu peralatan pendukung juga harus memadai sehingga bisa maksimal dalam pemanfaatan teknologi.

Perbaikan dan peningkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus secara berkesinambungan dioptimalisasi guna mencapai kondisi ideal yang akan secara maksimal menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pesisir Selatan. Pelaksanaan program-program pembangunan yang tersebar pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan perlu dilakukan koordinasi agar terlaksana sinergi tugas antar OPD. Untuk itu perlu ditetapkan Standar pelayanan dan standar tata kelola administrasi, seperti tata naskah dinas, laporan pelaksanaan pembangunan.

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Tergradasinya nilai-nilai adat, budaya dan agama di kalangan generasi muda merupakan tantangan pembangunan dimasa depan. Nilai-nilai filosofis adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah semakin tergerus dalam pelaksanaannya. Kondisi yang demikian jika dibiarkan berlangsung tanpa adanya peran aktif pemerintah dalam mengatasinya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Lunturnya nilai-nilai adat, budaya dan agama akan berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan bidang sumberdaya manusia, pembangunan fisik, maupun terhadap lingkungan.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 masih ditemui kendala-kendala, sehingga beberapa program dan kegiatan belum berjalan optimal sebagaimana yang direncanakan.

Program dan kegiatan yang masih belum optimal pelaksanaannya diantaranya terlihat pada masih rendahnya serapan dana yang telah dialokasikan untuk program atau kegiatan dimaksud. Program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD

Permasalahan:

- Sulit mendata barang persediaan pada masing-masing bagian.
- Belum adanya aplikasi untuk membukukan barang persediaan .

b. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Permasalahan:

- Kurangnya anggaran pada Kegiatan Administrasi Umum yang disebabkan karena kondisi Efisiensi Anggaran Refocusing untuk memenuhi kebutuhan anggaran penanganan pandemi covid.
- Sulitnya memantau potensi kebutuhan dimasing-masing bagian.
- Terbatasnya anggaran.

c. Kegiatan Penataan Organisasi

Permasalahan :

- Kurangnya respon Perangkat Daerah dalam memenuhi permintaan data untuk Penilaian Kinerja Perangkat Daerah
- Sering tidak tepat waktu penyampaian data penilaian kinerja Perangkat

d. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Permasalahan :

- Belum terdistribusinya koran ke Nagari-nagari secara merata
- Banyaknya media yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers
- Banyak wartawan yang belum memiliki kompetensi dari organisasi profesi dari organisasi profesi
- Terlalu banyak media yang bekerja untuk mempublikasikan kegiatan Pemerintah Daerah

- Publikasi di Media Sosial Terkait Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Masih menggunakan Perangkat Pribadi
- Masih menggunakan media Konvensional/ pajangan
- Proses penyimpanan Foto dan Video yang terbatas

2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

a. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat

Permasalahan:

- Terlambatnya Peraturan Bupati tentang Bantuan Hibah sehingga menghambat realisasi anggaran pada akhir tahun.
- Aturan Pencairan Anggaran Hibah dari Pemerintah Pusat belum jelas.

b. Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan

Permasalahan:

- Kurangnya perhatian dari Kepala Perangkat Daerah dalam penyampaian data, sehingga data yang disampaikan oleh Perangkat Daerah tidak valid, ini dapat dilihat dari ketidaksesuaian data yang disampaikan dengan data pendukung yang diberikan.
- Keterbatasan Sarana dan Prasarana dalam penunjang terlaksananya Kegiatan Penyusunan LPPD
- Kurangnya petunjuk teknis dalam penyusunan LPPD

3. Program Perekonomian dan Pembangunan

a. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Permasalahan :

- Pokja Pengadaan Barang dan Jasa masih bersifat *Adhoc*, sehingga proses pengadaan barang dan jasa kurang fokus, karena anggota pokja masih dibebani dengan tanggung jawab di instansi asal mereka.

b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

Permasalahan :

- Laporan yang diberikan tidak tepat waktu, sehingga menyulitkan untuk membuat lapor bulanan yang terkini sebagai bahan evaluasi pekerjaan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam RKPD Perubahan tahun 2025 terhadap kebutuhan dapat dilihat pada tabel 2.3. Pada Tabel tersebut dapat dilihat bahwa semua program dan kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal ini disebabkan karena program dan kegiatan telah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 2.3											
REVIEW TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2025											
KABUPATEN PESIR SELATAN											
PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH											
RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan
kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan					
	SEKRETARIAT DAERAH				32.071.058.921	SEKRETARIAT DAERAH				37.171.302.981	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	80%	27.940.670.254	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	80%	31.479.590.179.	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	116.983.320	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	116.983.320	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	116.983.320	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	116.983.320	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.557.283.188	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.557.283.188	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	123 Org	14.357.953.402	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	123 Org	14.357.953.402	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	199.329.786	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	199.329.786	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	35.780.208	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	35.780.208	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 dokumen	35.780.208	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 dokumen	35.780.208	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Sesuai SOP			100.000.000	
5						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan			100.000.000.	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	1.278.915.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.326.353.995	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	51.222.019	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	209.611.090	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	77.520.851	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	426.594.405	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	78.238.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	246.560.000	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.071.934.830	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.443.588.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	8 Unit	3.204.414.500	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	3.748.102.000	
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	3 Unit	2.402.239.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	3 Unit	2.402.239.000	
11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Unit	802.175.500	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Unit	1.195.863.000	
12						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnya yang disediakan		13 unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	. 2.798.063.256	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	3.446.594.062	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota	111.907.991	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas,	211.533.652	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

				Dinas, Surat Keputusan)					Surat Keputusan)		
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	36 Laporan	1.035.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	36 Laporan	1.035.000.000	
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	214.200.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	310.250.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Laporan	1.436.955.265	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Laporan	1.889.810.410	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	85 unit	1.337.802.394	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat Daerah yang dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	85 unit	1.693.150.118	
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	484.975.794	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	488.232.919	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	437.100.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	464.900.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	75 Unit	184.590.600	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	75 Unit	408.881.200	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	55.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	130.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	176.136.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	201.135.999	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	1.750.749.213	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	2.006.699.213	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	890.699.213	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	890.699.213	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	200.050.000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	456.000.000	
24	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	60.000.000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	60.000.000	
25	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	600.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	600.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	. 1.665.488.322	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	2.371.800.322	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	960.151.104	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	1.281.991.104	
27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	587.433.218	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	871.767.218	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	117.904.000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	218.042.000	
	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	143.180.343	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	143.180.343	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	58			Indeks Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	58		
		Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kab. Pesisir Selatan	70			Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kab. Pesisir Selatan	70		
		Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Publik	Kab. Pesisir Selatan	82			Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Publik	Kab. Pesisir Selatan	82		
29	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	45.484.887	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	45.484.887	
30	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan	33.392.471	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi	33.392.471	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

				Publik, Fasilitas Pelayanan Prima)					Pelayanan Prima)		
31	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	64.302.985	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	64.302.985	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	1.052.009.810	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	1.083.363.410	
32	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	1 Laporan	110.964.060	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	1 Laporan	142.317.660	
33	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan	941.045.75	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan	941.045.750	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	3.298.704.312	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.607.530.401	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	167.266.430.	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	167.266.430.	
34	Penataan Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	2.492.138	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	2.492.138	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

	Pemerintahan	Pemerintahan					Pemerintahan				
35	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	2.232.100	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	2.232.100	
36	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	162.542.192	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	162.542.192	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	79 Kali	. 2.955.804.158	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	79 Kali	4.264.630.247.	
37	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	1.086.422.955	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	2.030.072.950	
38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	1.316.343.280	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	1.673.691.630	

39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	553.037.923	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	560.865.667	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	. 164.890.124	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	164.890.124	
40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	500 dokumen	80.640.254	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	500 dokumen	80.640.254	
41	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 kasus	84.249.870	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 kasus	84.249.870	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 MOU	10.743.600	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 MOU	10.743.600	
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	10.743.600	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	10.743.600	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	831.684.356	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	934.182.401	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	144.219.458	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	144.219.458	
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	58.264.992	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	58.264.992	
44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	41.954.466	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	41.954.466	
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	44.000.000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	44.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	127.596.125	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	125.094.170	
46	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	45 Laporan	83.175.925	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	40 Laporan	87.779.320	
47	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	44.420.200	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	37.314.850	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	534.812.720	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	639.812.720	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

48	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	100 Dokumen	48.813.400	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	100 Dokumen	48.813.400
49	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	41 Dokumen	475.661.970	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	41 Dokumen	480.661.970
50	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	5 Orang	10.337.350	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	4 Orang	110.337.350
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	25.056.053	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	25.056.053
51	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	25.056.053	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	25.056.053
	TOTAL				32.071.058.921	TOTAL				37.171.302.981

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diutamakan yang merupakan usulan-usulan yang berasal dari aspirasi masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, khusus untuk bidang Koordinasi/Penunjang, usulan-usulan tersebut tidak dimunculkan/tidak ada dan dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2025

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	TIDAK ADA USULAN				

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024 dipengaruhi oleh kebijakan/peraturan di tingkat pusat / nasional antara lain RPJMN 2020-2024, Permendagri no 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota dan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Beberapa sasaran dan target yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 harus menjadi acuan dalam penyusunan renja 2025 yang antara lain menargetkan untuk sasaran Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola berupa indeks reformasi birokrasi minimal dengan kategori” BAIK”, Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik, Skor Sakip “B”.

Selain itu Renja Setda Tahun 2025 sudah memperhatikan Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota serta Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka pada Renja Tahun 2024 sudah sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 sehingga nomenklatur kegiatan juga sudah diarahkan sesuai dengan Tupoksi Setda berdasarkan Permendagri No. 56 Tahun 2019

3.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang diinginkan dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagaimana telah diuraikan pada bab terdahulu secara umum adalah mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, peningkatan pelayanan pada masyarakat yang didasari dengan ketaatan terhadap aturan-aturan hukum yang berlaku. Secara umum tujuan tersebut meliputi :

1. Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi.
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi.
3. Meningkatkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran dari Rencana Kerja Perubahan (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan merupakan totalitas dari sasaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dalam rangka merevitalisasi prinsip-prinsip pemerintahan yang baik serta meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dan masyarakat. Sasaran dan indikator kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Berkinerja, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target
 - b. Nilai Sakip
 - c. Nilai LPPD
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Sekretariat Daerah, dengan indikator kinerja :
 - a. Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, dengan indikator kinerja :
 - a. Laju Inflasi Daerah

Untuk mengevaluasi pencapaian sasaran tersebut, maka dirumuskan indikator sasaran. Indikator sasaran yang digunakan untuk menilai pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025. Tujuan, Sasaran dan target kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renja Perubahan Sekretrariat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025

No.	Tujuan	Sasaran	IndikatorSasaran	Target Kinerja Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Berkinerja Tinggi	Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berkinerja	Persentase Kinerja Kepala OPD yang tercapai target	96 %
			Nilai SAKIP	76 (BB)
			Nilai LPPD	3,2340

2.	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Inovasi Sekretariat Daerah	Nilai Kematangan Inovasi Sekretariat Daerah	100 %
3.	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin	Laju Inflasi Daerah	3,5 %

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam Renja Perubahan ini Sekretariat Daerah melaksanakan 3 program, 19 kegiatan dan 49 sub kegiatan dengan jumlah total dana Pagu indikatif sebesar Rp. 37.021.302.981,-dari Dana Alokasi Umum (DAU). Lokasi kegiatan terpusat di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.

Program kerja dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan disusunlah Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman serta arahan aktivitas tahunan sebagai penjabaran kegiatan dan sasaran yang diharapkan dapat dicapai dari rencana strategik dalam mencapai tujuan yang berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Program dan Kegiatan tersebut yaitu :

1. Program Administrasi Umum
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - 4) Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 5) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 7) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 8) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 9) Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 10) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 11) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 12) Pengadaan Mebel
 - 13) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 14) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 15) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 16) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 17) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 18) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 19) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 20) Pemeliharaan Mebel
 - 21) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 22) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 23) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- h. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 24) Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 25) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 26) Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 - 27) Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- i. Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
 - 28) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
 - 29) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
 - 30) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- j. Penataan Organisasi
 - 31) Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - 32) Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 33) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
 - 34) Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - 35) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
- k. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
 - 36) Fasilitas Keprotokolan
 - 37) Fasilitas Komunikasi Pimpinan
 - 38) Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - a. Administrasi Tata Pemerintahan
 - 39) Penataan Administrasi Pemerintahan
 - 40) Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
 - 41) Fasilitas Pelaksanaan Otonomi Daerah
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
 - 42) Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - 43) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - 44) Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat
 - c. Fasilitas dan Koordinasi Hukum
 - 45) Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Daerah
 - 46) Fasilitas Bantuan Hukum
 - 47) Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
 - d. Fasilitas Kerjasama Daerah
 - 48) Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
- 3. Program Perekonomian dan Pembangunan
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
 - 49) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

- 50) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 51) Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil
- b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
 - 52) Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
 - 53) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
 - 54) Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
- c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 55) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
 - 56) Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
 - 57) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
- d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
 - 58) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
 - 59) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup
 - 60) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air.

Masing-masing Program dan Kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.2

RUMUSAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2025

DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2026

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten Pesisir Selatan

Tahun 2025

UNIT ORGANISASI : SEKRETARIAT DAERAH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Perubahan Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung-jawab
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan									
	SEKRETARIAT DAERAH				37.171.302.981				37.171.302.981	
	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	80%	31.479.590.179.	Dana Transfer Umum		80%	31.479.590.179.	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja sekretariat daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	116.983.320	Dana Transfer Umum		100%	116.983.320	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	116.983.320	Dana Transfer Umum		4 Dokumen	116.983.320	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	14.557.283.188	Dana Transfer Umum		100%	14.557.283.188	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pesisir Selatan	123 Org	14.357.953.402	Dana Transfer Umum		123 Org	14.357.953.402	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	199.329.786	Dana Transfer Umum		12 Laporan	199.329.786	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	35.780.208	Dana Transfer Umum		100%	35.780.208	
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 dokumen	35.780.208	Dana Transfer Umum		12 dokumen	35.780.208	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase layanan Administasi Kepegawaian Sesuai SOP	Kab. Pesisir Selatan	40 PNS	100.000.000	Dana Transfer Umum		40 PNS	100.000.000	
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Kab. Pesisir Selatan	40 PNS	100.000.000.	Dana Transfer Umum		40 PNS	100.000.000.	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan Administrasi Umum Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	2.326.353.995	Dana Transfer Umum		100%	2.326.353.995	
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	4 Paket	209.611.090	Dana Transfer Umum		4 Paket	209.611.090	
7	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	426.594.405	Dana Transfer Umum		2 Paket	426.594.405	
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan	Kab. Pesisir Selatan	3 Laporan	246.560.000	Dana Transfer Umum		3 Laporan	246.560.000	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

		Tamu								
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	1.443.588.500	Dana Transfer Umum		12 Laporan	1.443.588.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diusulkan pada RKBMD	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit	3.748.102.000	Dana Transfer Umum		15 Unit	3.748.102.000	
10	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Pengadaan yang disediakan	Kab. Pesisir Selatan	3 Unit	2.402.239.000	Dana Transfer Umum		3 Unit	2.402.239.000	
11	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Unit	1.195.863.000	Dana Transfer Umum		5 Unit	1.195.863.000	
12	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnua	Jumlah Unit Peralatan dan mesin lainnua yang disediakan		13 unit	150.000.000	Dana Transfer Umum		13 unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dana untuk Jasa penunjang urusan Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	3.446.594.062	Dana Transfer Umum		12 Bulan	3.446.594.062	
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	211.533.652	Dana Transfer Umum		4 Laporan (Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Surat Keputusan)	211.533.652	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	36 Laporan	1.035.000.000	Dana Transfer Umum		36 Laporan	1.035.000.000	
15	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	310.250.000	Dana Transfer Umum		12 Laporan	310.250.000	
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	5 Laporan	1.889.810.410	Dana Transfer Umum		5 Laporan	1.889.810.410	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah Barang Milik Daerah di Sekretariat	Kab. Pesisir Selatan	85 unit	1.693.150.118	Dana Transfer Umum		85 unit	1.693.150.118	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

	Daerah	Daerah yang dipelihara								
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Pesisir Selatan	7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	488.232.919	Dana Transfer Umum		7 Unit Mobil/ 4 Unit Motor	488.232.919	
18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Pesisir Selatan	15 Unit Mobil/41 Unit Motor	464.900.000	Dana Transfer Umum		15 Unit Mobil/41 Unit Motor	464.900.000	
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Pesisir Selatan	75 Unit	408.881.200	Dana Transfer Umum		75 Unit	408.881.200	
20	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	130.000.000	Dana Transfer Umum		2 Unit	130.000.000	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Pesisir Selatan	2 Unit	201.135.999	Dana Transfer Umum		2 Unit	201.135.999	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah dana untuk biaya administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	2.006.699.213	Dana Transfer Umum		12 Bulan	2.006.699.213	
22	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang/Bulan	890.699.213	Dana Transfer Umum		2 Orang/Bulan	890.699.213	
23	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang	Kab. Pesisir Selatan	2 Paket	456.000.000	Dana Transfer Umum		2 Paket	456.000.000	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

		Disediakan								
24	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	2 Orang	60.000.000	Dana Transfer Umum		2 Orang	60.000.000	
25	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Pesisir Selatan	±400 Org	600.000.000	Dana Transfer Umum		±400 Org	600.000.000	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah dana yang disediakan untuk biaya fasilitasi rumahtangga Sekretariat Daerah	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	2.371.800.322	Dana Transfer Umum		12 Bulan	2.371.800.322	
26	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	1.281.991.104	Dana Transfer Umum		1 Paket	1.281.991.104	
27	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	871.767.218	Dana Transfer Umum		1 Paket	871.767.218	
28	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kab. Pesisir Selatan	1 Paket	218.042.000	Dana Transfer Umum		1 Paket	218.042.000	
	Penataan Organisasi	Persentase penataan organisasi perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	143.180.343	Dana Transfer Umum		100%	143.180.343	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	58		Dana Transfer Umum		58		
		Kualifikasi Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah	Kab. Pesisir Selatan	70		Dana Transfer Umum		70		
		Indeks Kepuasan terhadap masyarakat pelayanan Publik	Kab. Pesisir Selatan	82		Dana Transfer Umum		82		
29	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen	45.484.887	Dana Transfer Umum		2 Dokumen	45.484.887	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

		Kelembagaan dan Analisis Jabatan								
30	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Pesisir Selatan	4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	33.392.471	Dana Transfer Umum		4 Laporan (Inovasi Pelayanan Publik, Indeks Kepuasan Masyarakat, Surfey Pelayanan Publik, Fasilitasi Pelayanan Prima)	33.392.471	
31	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Pesisir Selatan	3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	64.302.985	Dana Transfer Umum		3 dokumen (Hasil Surfey Internal, Road Map 2021-2026, Indek RB)	64.302.985	
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah pelaksanaan kegiatan protokoler dan komunikasi pimpinan serta kerja sama media	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	1.083.363.410	Dana Transfer Umum		12 Bulan	1.083.363.410	
32	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Pesisir Selatan	1 Laporan	142.317.660	Dana Transfer Umum		1 Laporan	142.317.660	
33	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan	941.045.750	Dana Transfer Umum		2 Laporan	941.045.750	
						Dana Transfer Umum				
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persesentase peran serta pemerintah daerah untuk meningkatkan kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	4.607.530.401	Dana Transfer Umum		100%	4.607.530.401	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase capaian kinerja untuk penataan pemerintahan dan otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	100%	167.266.430.	Dana Transfer Umum		100%	167.266.430.	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

34	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	2.492.138	Dana Transfer Umum		3 Dokumen	2.492.138	
35	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	2.232.100	Dana Transfer Umum		5 Dokumen	2.232.100	
36	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	162.542.192	Dana Transfer Umum		3 Dokumen (LPPD, LKPj, SPM)	162.542.192	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah fasilitasi pengelolaan kesejahteraan sosial dan masyarakat yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	79 Kali	4.264.630.247.	Dana Transfer Umum		79 Kali	4.264.630.247.	
37	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	2.030.072.950	Dana Transfer Umum		5 Dokumen	2.030.072.950	
38	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	1.673.691.630	Dana Transfer Umum		5 Dokumen	1.673.691.630	
39	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan	Kab. Pesisir Selatan	4 Dokumen	560.865.667	Dana Transfer Umum		4 Dokumen	560.865.667	

Renja Perubahan Sekretariat Daerah Kab.Pesisir Selatan Tahun 2025

		Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas								
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah terhadap fasilitasi bantuan hukum yang dilakukan	Kab. Pesisir Selatan	12 Bulan	164.890.124	Dana Transfer Umum		12 Bulan	164.890.124	
40	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab. Pesisir Selatan	500 dokumen	80.640.254	Dana Transfer Umum		500 dokumen	80.640.254	
41	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Pesisir Selatan	3 kasus	84.249.870	Dana Transfer Umum		3 kasus	84.249.870	
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase kerjasama yang difasilitasi oleh pemerintah daerah	Kab. Pesisir Selatan	3 MOU	10.743.600	Dana Transfer Umum		3 MOU	10.743.600	
42	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Pesisir Selatan	3 Dokumen	10.743.600	Dana Transfer Umum		3 Dokumen	10.743.600	
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase peningkatan Layanan Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	934.182.401	Dana Transfer Umum		100%	934.182.401	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase peningkatan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	144.219.458	Dana Transfer Umum		100%	144.219.458	
43	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Pesisir Selatan	2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	58.264.992	Dana Transfer Umum		2 Dokumen (BPR Samudra, PDAM)	58.264.992	
44	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi	Kab. Pesisir Selatan	2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	41.954.466	Dana Transfer Umum		2 Laporan (Inflasi, TPAKD)	41.954.466	

		Perekonomian								
45	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab. Pesisir Selatan	1 Dokumen	44.000.000	Dana Transfer Umum		1 Dokumen	44.000.000	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	100%	125.094.170	Dana Transfer Umum		100%	125.094.170	
46	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	40 Laporan	87.779.320	Dana Transfer Umum		40 Laporan	87.779.320	
47	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Pesisir Selatan	12 Laporan	37.314.850	Dana Transfer Umum		12 Laporan	37.314.850	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan	Kab. Pesisir Selatan	100%	639.812.720	Dana Transfer Umum		100%	639.812.720	
48	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	100 Dokumen	48.813.400	Dana Transfer Umum		100 Dokumen	48.813.400	
49	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab. Pesisir Selatan	41 Dokumen	480.661.970	Dana Transfer Umum		41 Dokumen	480.661.970	
50	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Pesisir Selatan	4 Orang	110.337.350	Dana Transfer Umum		4 Orang	110.337.350	
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase pelaksanaan Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Pesisir Selatan	100%	25.056.053	Dana Transfer Umum		100%	25.056.053	
51	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan,	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi,	Kab. Pesisir Selatan	5 Dokumen	25.056.053	Dana Transfer Umum		5 Dokumen	25.056.053	

	Kelautan, dan Perikanan	dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja								
	TOTAL				37.171.302.981					

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Sekretariat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Sekretariat Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang. Memantau perkembangan pelaksanaan program dan kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan kedalam kegiatan prioritas beserta kebutuhannya.

Rencana program, kegiatan dan pendanaan indikatif adalah sebagai berikut:

TABEL 4.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN TAHUN 2025

Kode					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Pagu Indikatif (Rp.)
<u>1</u>					<u>2</u>	<u>3</u>
					Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	
4	01				SEKRETARIAT DAERAH	37.171.302.981
4	01	01			PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	31.479.590.179
4	01	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116.983.320
4	01	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	116.983.320
4	01	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	14.557.283.188
4	01	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.357.953.402
4	01	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0
4	01	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	199.329.786
4	01	01	2,03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	35.780.208
4	01	01	2,03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	35.780.208
4	01	01	2,03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0
4	01	01	2,05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100.000.000
4	01	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
4	01	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.326.353.995.
4	01	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	209.611.090
4	01	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	426.594.405
4	01	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	426.594.405
4	01	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	246.560.000
4	01	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.443.588.500
4	01	01	2,07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.748.102.000
4	01	01	2,07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	2.402.239.000
4	01	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	1.195.863.000
4	01	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
4	01	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.446.594.062
4	01	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	211.533.652

4	01	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.035.000.000
4	01	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.250.000
4	01	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.889.810.410
4	01	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.693.150.118
4	01	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	488.232.919
4	01	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	464.900.000
4	01	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	408.881.200
4	01	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	130.000.000
4	01	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	201.135.999
4	01	01	2,11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.006.699.213
4	01	01	2,11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	890.699.213
4	01	01	2,11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	456.000.000
4	01	01	2,11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	60.000.000
4	01	01	2,11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	600.000.000
4	01	01	2,12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	2.371.800.322
4	01	01	2,12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	1.281.991.104
4	01	01	2,12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	871.767.218
4	01	01	2,12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	218.042.000
4	01	01	2,13		Penataan Organisasi	143.180.343.
4	01	01	2,13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	45.484.887.
4	01	01	2,13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	33.392.471.
4	01	01	2,13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	64.302.985
4	01	01	2,14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1.083.363.410
4	01	01	2,14	01	Fasilitasi Keprotokolan	142.317.660.
4	01	01	2,14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	941.045.750

4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.607.530.401
4	01	02	2,01		Administrasi Tata Pemerintahan	167.266.430.
4	01	02	2,01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	2.492.138
4	01	02	2,01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2.232.100
4	01	02	2,01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	162.542.192
4	01	02	2,02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.264.630.247
4	01	02	2,02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	2.030.072.950
4	01	02	2,02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.673.691.630
4	01	02	2,02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	560.865.667
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	164.890.124
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	80.640.254
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	84.249.870
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	10.743.600
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	10.743.600
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	934.182.401
4	01	03	2,01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	144.219.548
4	01	03	2,01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	58.264.992
4	01	03	2,01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	41.954.466.
4	01	03	2,01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	44.000.000
4	01	03	2,02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	125.094.170
4	01	03	2,02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	87.779.320
4	01	03	2,02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	37.314.850.
4	01	03	2,03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	639.812.720
4	01	03	2,03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	48.813.400
4	01	03	2,03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	480.661.970
4	01	03	2,03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	110.337.350
4	01	03	2,04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	25.056.053
4	01	03	2,04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	25.056.053
					JUMLAH	37.171.302.981

BAB V

PENUTUP

Dalam Renja ini telah dijabarkan dengan rinci semua permasalahan yang akan dihadapi dan rencana strategis untuk memecahkan semua permasalahan dan kendala di Bagian – Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penyusunan Rencana Kinerja dipilih sasaran yang akan dicapai dalam tahun bersangkutan dengan memperhatikan permasalahan maupun isu strategis yang ada.

Rencana Kerja yang telah disusun ini diharapkan bermanfaat dalam rangka penguatan peran serta *stakeholder* dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan.

Perencanaan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 akan berjalan dan berhasil dengan baik apabila didukung dengan persepsi dan langkah yang sama oleh seluruh staf dan Pejabat Struktural Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja 2025 ini sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di tahun 2025 agar tercapainya visi dan misi Sekretariat Daerah demi menunjang pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESIR SELATAN**



MAWARDI ROSKA, S.IP
NIP. 19670907 198902 1 001